

UPAYA PENANGGULANGAN DAMPAK PANDEMI COVID-19 DALAM MENURUNKAN ANGKA KEMISKINAN DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Oleh

Yuliani Y.
Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
yulianiinopi@gmail.com

Abstrak

Tahun 2020 merupakan tahun terberat bagi seluruh negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Sejak munculnya kasus Covid-19 pada awal Maret 2020 lalu, berbagai dampak telah dirasakan pada berbagai bidang. Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat dan peningkatan angka kematian saja, namun pandemi ini telah berhasil membuat Indonesia jatuh ke lubang resesi dengan laju pertumbuhan ekonomi mencapai -2,07 persen (y-to-y) pada tahun 2020. Hal yang sama juga terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jika kita lihat tren angka kemiskinannya, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir pemerintah Bangka Belitung telah berhasil menekan angka kemiskinan. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada bulan September 2017 persentase penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 5,3 persen. Angka ini terus menurun hingga pada bulan September 2019 persentase penduduk miskin tercatat menjadi 4,5 persen. Namun dengan adanya Covid-19, persentase penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini kembali meningkat menjadi 4,53 persen pada bulan Maret 2020 dan terus meningkat hingga 4,89 persen pada bulan September 2020. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dampak pandemi Covid-19 terhadap kemiskinan di Indonesia khususnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Keyword: Penanggulangan Dampak Pandemi, angka kemiskinan, covid 19

Pendahuluan

Permasalahan dalam penanganan kemiskinan di Indonesia adalah belum berhasilnya penanggulangan kemiskinan di sektor pertanian dan perdesaan. Jumlah penduduk miskin di desa jauh lebih besar dibandingkan dengan penduduk miskin di kota. Basis ekonomi desa umumnya pertanian, sehingga pengurangan kemiskinan pada rumah tangga pertanian dipercaya sebagai kunci mewujudkan penurunan angka kemiskinan nasional (Tarigan *et al.* 2019). Salah satu penyebab kemiskinan yang tidak sering dibahas adalah bencana atau wabah penyakit.

Tahun 2020 merupakan tahun terberat bagi seluruh negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Sejak munculnya kasus Covid-19 pada awal Maret 2020 lalu, berbagai dampak telah dirasakan pada berbagai bidang. Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat dan peningkatan angka kematian saja, namun pandemi ini telah berhasil membuat Indonesia jatuh ke lubang resesi dengan laju pertumbuhan ekonomi mencapai -2,07 persen (y-to-y) pada tahun 2020. Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menerapkan kebijakan pembatasan sosial

berskala besar (PSBB). Kebijakan PSBB mengharuskan masyarakat Indonesia untuk tetap berada di rumah dan melakukan aktivitas terbatas di luar hanya untuk keperluan yang mendesak saja. Hal ini tentunya berdampak pada masalah sosial dan ekonomi masyarakat.

Sebagian masyarakat kehilangan pendapatannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Begitu pun dengan pelaku usaha tidak dapat melakukan kegiatan usahanya. Usaha masyarakat yang terdampak inilah yang akhirnya menyebabkan naiknya tingkat kemiskinan di Indonesia. Padahal dalam kurun waktu dua tahun terakhir pemerintah telah berhasil menekan angka kemiskinan Indonesia hingga menyentuh angka satu digit hingga 9,22 persen pada bulan September 2019.

Hal yang sama juga terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jika kita lihat tren angka kemiskinannya, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir pemerintah Bangka Belitung telah berhasil menekan angka kemiskinan. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada bulan September 2017 persentase penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 5,3 persen. Angka ini terus menurun hingga

pada bulan September 2019 persentase penduduk miskin tercatat menjadi 4,5 persen. Namun dengan adanya Covid-19, persentase penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini kembali meningkat menjadi 4,53 persen pada bulan Maret 2020 dan terus meningkat hingga 4,89 persen pada bulan September 2020.

Dalam menghitung angka kemiskinan, BPS menggunakan pendekatan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar baik dari makanan maupun nonmakanan yang diukur melalui garis kemiskinan. Jika penduduk memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, maka dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Selama masa pandemi (periode Maret 2020-September 2020), garis kemiskinan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami kenaikan sebesar 0,78 persen yaitu Rp721.455 per kapita per bulan pada bulan Maret 2020 naik menjadi Rp727.114 per kapita per bulan pada bulan September 2020. Selama periode tersebut jumlah penduduk miskin juga mengalami peningkatan dari 25,53 ribu orang pada bulan Maret 2020 bertambah menjadi

28,38 ribu orang pada bulan September 2020.

Jika dilihat dari rata-rata pengeluaran penduduk kelompok 10 persen ke bawah, baik daerah perkotaan maupun pedesaan mengalami penurunan. Penurunan pengeluaran pada daerah perkotaan dari Rp728.462 pada bulan Maret 2020 menurun menjadi Rp708.552 pada bulan September 2020. Sementara itu, pengeluaran untuk daerah pedesaan menurun dari Rp690.290 pada bulan Maret 2020 menjadi Rp677.278 pada bulan September 2020. Pandemi Covid-19 yang berdampak pada perubahan perilaku serta aktivitas ekonomi penduduk menjadi penyebab terjadinya peningkatan angka kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Banyak pelaku usaha melakukan berbagai cara agar dapat bertahan di tengah pandemi ini. Tak sedikit dari mereka mengurangi jam kerja pekerja, merumahkan sementara pekerjanya, bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja. Kondisi ini sejalan dengan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan sebesar 1,67 poin menjadi 5,25 persen pada Agustus 2020.

Sebanyak 99.991 orang penduduk usia kerja terdampak Covid 19. Dari

penduduk usia kerja yang terdampak pandemi tersebut, 10.209 orang menjadi pengangguran, 5.759 orang bukan angkatan kerja, 7.631 orang sementara tidak bekerja, dan 76.392 orang penduduk bekerja mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi dampak dari pandemi Covid-19 dan menghambat laju angka kemiskinan. Pemerintah telah mengeluarkan dana dalam jumlah besar untuk disalurkan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 melalui program perlindungan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), BLT (Bantuan Langsung Tunai), kartu prakerja, BPUM (Bantuan Pelaku Usaha Mikro) hingga diskon tarif listrik bagi kalangan masyarakat dan pelaku usaha tertentu. Namun upaya tersebut sepertinya belum cukup mampu untuk menyelamatkan perekonomian dan kesejahteraan bagi sebagian penduduk di tengah pandemi ini.

Pemerintah harus memperhatikan kembali bantuan yang diberikan tersebut apakah sudah tepat sasaran khususnya bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 serta ketepatan penggunaannya. Karena masih ditemukan di lapangan penerima-penerima bantuan pemerintah yang belum tepat sasaran. Oleh karena itu, pemerintah

perlu meningkatkan keakuratan verifikasi data penerima bantuan agar bantuan-bantuan yang sudah diprogramkan pemerintah untuk mengatasi dampak Covid-19 tersebut tepat sasaran.

Selanjutnya, bantuan modal bagi pelaku usaha yang diberikan oleh pemerintah tidak selalu menjadi hal yang dibutuhkan. Hal lain yang harus diperhatikan adalah pemasaran dari produk yang telah dihasilkan. Pemerintah harus mampu mempersiapkan pasar agar produk yang dihasilkan tersebut dapat dijual. Selain itu, pemerintah juga perlu menjaga stabilitas harga terutama harga komoditas yang berpengaruh terhadap penghitungan garis kemiskinan. Jika inflasi tinggi maka daya beli masyarakat pun akan menjadi turun. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini sangatlah penting terutama bagi penduduk yang berada di sekitar garis kemiskinan atau rentan miskin agar tidak jatuh ke kategori miskin ke depannya. Hal ini mengakibatkan terjadinya peningkatan pengangguran, penurunan tingkat produktivitas individu maupun perusahaan, dan mendorong munculnya orang miskin baru yang secara agregat meningkatkan jumlah penduduk miskin (Izzati 2020; Suryahadi et al. 2020). Sehubungan dengan itu, pemerintah perlu mengupayakan penanggulangan kemiskinan, baik yang sifatnya jangka

pendek, menengah, maupun jangka panjang (Yusuf 2020).

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dampak pandemi Covid-19 terhadap kemiskinan di Indonesia khususnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kajian akan difokuskan pada empat aspek: perkembangan kemiskinan dilihat dari jumlah, dan keparahan kemiskinan; kedua, sebaran kemiskinan; dan ketiga, bagaimana dampak pandemi Covid-19 terhadap kemiskinan dan respons kebijakan. Aspek pertama, kedua, dan ketiga akan dipakai sebagai pembelajaran untuk aspek keempat, yaitu merumuskan saran kebijakan upaya penanggulangan kemiskinan.

Kemiskinan diukur dari kemampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Pendekatan ini memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi sehingga status kemiskinan diukur menurut garis kemiskinan (GK), yakni kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Dengan demikian, pendapatan yang menentukan daya beli dan harga barang konsumsi

menjadi faktor penting dalam menentukan jumlah dan posisi kemiskinan. Perkembangan kemiskinan antarwilayah maupun antarsektor tidak sama akibat perbedaan faktor sumber daya, aksesibilitas terhadap teknologi informasi, kesempatan kerja, dan keterjangkauan program pembangunan yang berbeda (Tarigan et al. 2019; Todaro dan Smith 2006). Pandemi Covid-19 yang mengglobal diduga berdampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat, sehingga menjadi cukup menarik untuk mencoba mengkaji dampak pandemi terhadap kemiskinan di Indonesia.

Data kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) periode tahun 2019–2020. Analisis dampak pandemi akan menyoroti data bulan Maret 2020 hingga Maret 2021. Periode ketersediaan data sejak terjadinya pandemi. Diakui bahwa tulisan ini memiliki kelemahan untuk melihat dampak yang diakibatkan data yang masih sangat singkat. Pengayaan hasil olahan data dilakukan dengan *review* ilmiah hasil-hasil penelitian terkait dan berdiskusi dengan *key informan* yang mendalami masalah

kemiskinan.

METODE

Kemiskinan diukur dari kemampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor. Pendekatan ini memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi sehingga status kemiskinan diukur menurut garis kemiskinan (GK), yakni kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan.

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM)

merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Dengan demikian, pendapatan yang menentukan daya beli dan harga barang konsumsi menjadi faktor penting dalam menentukan jumlah dan posisi kemiskinan. Perkembangan kemiskinan antar wilayah maupun antar sektor tidak sama akibat perbedaan faktor sumber daya, aksesibilitas terhadap teknologi informasi, kesempatan kerja, dan keterjangkauan program pembangunan yang berbeda (Smith, 2006). Pandemi Covid-19 yang mengglobal diduga berdampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat, sehingga menjadi cukup menarik untuk mencoba mengkaji dampak pandemi terhadap kemiskinan di Indonesi. Tulisan ini menggunakan data kemiskinan Badan

Pusat Statistik (BPS) periode tahun 2020/2021. Analisis dampak pandemi akan menyoroti data bulan Maret 2020 hingga Maret 2021, periode ketersediaan data sejak terjadinya pandemi. Diakui bahwa tulisan ini memiliki kelemahan untuk melihat dampak yang diakibatkan data yang masih sangat singkat. Pengayaan hasil olahan data dilakukan dengan review ilmiah hasil-hasil penelitian terkait dan berdiskusi dengan key informan yang mendalami masalah kemiskinan. Tulisan dinarasikan dengan sistematika yang sejalan dengan tujuan kajian dan ditutup dengan saran rekomendasi kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Kemiskinan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kecenderungan jumlah penduduk miskin periode September 2017 sampai September 2019 konsisten turun secara melandai sebanyak 0,8% yaitu dari 5,3% menurun ke angka 4,5 %. Pada periode September 2019 hingga Maret 2020 terjadi arah yang berlawanan dengan jumlah dan prevalensi kemiskinan baik di perkotaan, perdesaan, maupun nasional menunjukkan angka meningkat. Pada bulan Maret 2020 sampai dengan September 2021 Angka kemiskinan meningkat dikarenakan

Pandemi COVID 19 melanda atau dari 25.53 ribu jiwa menjadi 28.38 ribu jiwa. Berdasarkan wilayahnya, peningkatan kemiskinan di perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan peningkatan di perdesaan.

Permasalahan kemiskinan tidak hanya sekedar menghitung persentase dan jumlah penduduk miskin. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah mengenai tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap GK. Semakin tinggi nilai P1, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari GK. Melalui indeks keparahan kemiskinan (P2) akan tergambar penyebaran pengeluaran kebutuhan penduduk miskin jadi jika nilai P2 maka semakin tinggi pula ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Hasil Survey Dampak COVID 19 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020

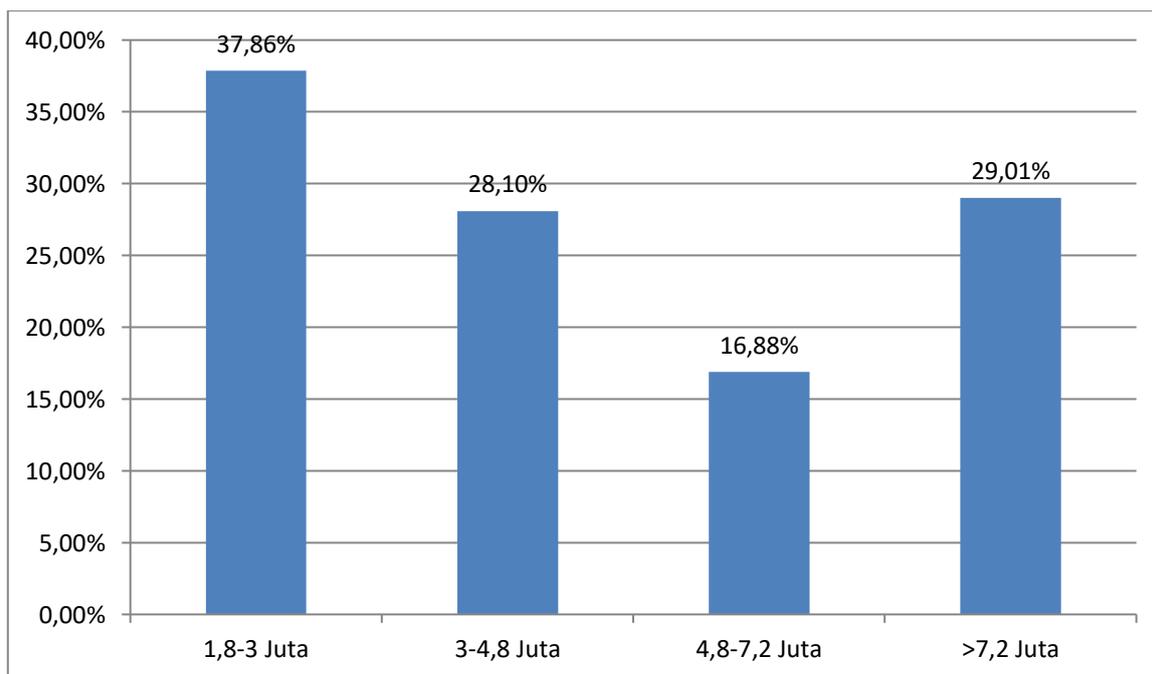
Wabah COVID-19 telah memukul industri pariwisata dalam negeri. Adanya pembatasan sosial dan larangan kunjungan wisatawan asing maupun wisatawan domestik telah menyebabkan penurunan jumlah wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke tempat tujuan wisata di Indonesia, termasuk

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 3 jenis lapangan usaha terdampak yang termasuk ke dalam sektor pariwisata yaitu sektor Industri Pengolahan; sektor Penyedia Akomodasi dan Makan Minum; serta sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

- Responden yang bekerja di sektor Industri Pengolahan menjadi responden yang paling terdampak (100% mengalami penurunan pendapatan).

- 91,67% responden yang bekerja di sektor Penyedia Akomodasi dan Makan Minum mengaku mengalami penurunan pendapatan akibat terdampak COVID-19.
- 6 dari 10 responden yang bekerja di sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mengaku mengalami penurunan pendapatan

Grafik Persentase Penurunan Pendapatan Menurut Kelompok



Penanggulangan Dampak Covid dari Pemerintah Kepulauan Bangka Belitung

Untuk menanggulangi dampak Covid-19 terhadap para pelaku usaha IKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel). Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov. Babel) melalui UPTD. Rumah Promosi dan Kemasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Kepulauan Babel akan membagikan 5.000 kemasan kepada pelaku usaha IKM se-Babel.

Dr. Muslim El Hakim Kurniawan, ST., MM selaku Kepala UPTD Rumah Promosi dan Kemasan (RPK) menjelaskan latar belakang pembagian 5.000 kemasan kepada pelaku usaha IKM se-Provinsi Kepulauan Babel itu berdasarkan hasil survey pada bulan Maret 2020, pada awal pandemi yang berdampak pada merosotnya omset para pelaku usaha IKM di Provinsi Babel. Berdasarkan latar belakang tersebut, UPTD Rumah Promosi dan Kemasan Babel pada tahun ini akan memberikan stimulan kemasan kepada 50 IKM se-Babel, yang mana masing-masing IKM akan mendapatkan 100 kemasan. IKM tersebut terdiri dari IKM OVOP dan IKM potensial yang terdampak Covid-19.

Salah satu poin yang dapat meningkatkan daya saing produk adalah kemasan yang baik dan terjangkau. Saat

ini secara umum, UMKM atau IKM masih menggunakan kemasan yang sederhana dengan alasan efisiensi karena, kemasan yang menarik dan baik biasanya mensyaratkan minimum pesanan. Bahkan, beberapa UMKM dan IKM pangan harus mengeluarkan uang sejumlah Rp 15.000.000,- diawal, untuk memesan kemasan padahal, jika minimum order dapat dihilangkan maka, modal tersebut dapat diputar untuk keperluan yang lain terutama di masa pandemi seperti saat ini.

Karena itu, sesuai arahan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman, UPTD Rumah Promosi dan Kemasan Babel hadir dalam rangka membantu UMKM dan IKM guna mendapatkan kemasan yang baik hingga dapat dipasarkan hingga ke tingkat nasional bahkan global sekaligus, menghilangkan minimum order yang menjadi salah satu kendala mereka untuk memesan kemasan yang lebih baik. Dalam penjelasannya, pembagian 5.000 kemasan kepada pelaku usaha IKM juga bertujuan untuk menjadi media promosi bagi UPTD RPK bahwa, UPTD RPK kini sudah bisa memproduksi kemasan yang dibutuhkan IKM dengan harga terjangkau dan tanpa minimum order karena, 5.000 kemasan tersebut akan diproduksi sendiri oleh UPTD RPK. Hal ini merupakan salah satu cara yang dilakukan Pemerintah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung dalam menanggulangi dampak Covid 19 dan mengurangi angka kemiskinan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kesimpulan

Kesimpulan Pandemi Covid-19 yang berdampak pada perubahan perilaku dan aktivitas ekonomi telah mendorong peningkatan jumlah dan angka kemiskinan, baik secara nasional, wilayah desa-kota, maupun secara pulau-provinsi. Penurunan pendapatan terjadi akibat peningkatan pengangguran dan menurunnya kesempatan bekerja dan berusaha. Dampak Covid-19 terbesar terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan berpengaruh kuat pada sektor informal, perdagangan besar dan kecil, jasa (termasuk pariwisata dan transportasi), dan pertanian. Pandemi Covid-19 berdampak pada kedalaman dan keparahan kemiskinan di mana ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap GK semakin tinggi yang berarti semakin jauh dari GK. Penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin semakin timpang. Dampak pandemi bersifat global, tetapi dampak lebih besar terjadi pada masyarakat miskin, dan ini telah memperlebar terjadinya kesenjangan. Guna mengatasi guncangan kesehatan,

ekonomi, dan sosial yang terjadi sebagai dampak dari pandemi Covid-19, pemerintah melaksanakan program kendali cepat jangka pendek berupa bantuan jaringan pengaman sosial pangan yang berfungsi membantu peningkatan konsumsi (sembako, listrik) dan pendapatan (uang). Program jangka menengah juga diberikan berupa kartu prakerja yang dilengkapi dengan pendapatan jangka pendek berupa stimulus insentif pada UMKM dalam bentuk keringanan pajak, penurunan suku bunga pinjaman, penundaan tempo bayar, dan insentif permodalan.

Saran

Dampak pandemi Covid-19 terhadap kemiskinan menunjukkan perkembangan dan sebaran kemiskinan yang beragam sehingga memerlukan mekanisme intervensi penanggulangan yang tidak seragam. Kelompok sasaran sebaiknya dipilah menjadi tiga masa penanganan dampak sebagai berikut.

1. Jangka pendek: program JPS bagi masyarakat miskin yang terdampak berat yang berada pada posisi yang sama dengan kelompok miskin kronis. Bantuan berupa pangan dan keringanan terhadap kebutuhan mendasar nonpangan lainnya.

Kebijakan ini dilakukan secara berkala dengan sasaran semakin berkurang secara bertahap.

2. Jangka menengah: program kombinasi peningkatan konsumsi, pendapatan, sekaligus program prakerja kepada masyarakat miskin usia kerja, pernah bekerja, dan atau potensial bekerja pada saat kondisi pandemi sudah bisa diadaptasi atau diatasi.
3. Jangka panjang: program bantuan modal usaha dan kondisi kondusif untuk kelompok miskin terdampak pandemi yang memiliki asset atau pernah berproduksi. Keringanan mengakses permodalan, infrastruktur penunjang, keringanan harga input, dan penciptaan iklim pasar yang kondusif.

Agar program mencapai sasaran yang tepat berdasarkan kelompoknya dan dilakukan secara efektif dan efisien, maka diperlukan pemutakhiran (*update*) data kependudukan untuk mendapatkan orang, jumlah, dan wilayah sasaran yang sesuai. Pemilahan penerima bantuan akibat dampak pandemi atau akibat lain membutuhkan pemilihan bentuk program yang sesuai. Di samping terus memperbarui data penduduk miskin

dan rentan miskin, pemerintah perlu meningkatkan anggaran dan jumlah penerima bansos dan prakerja. Antisipasi ketahanan akibat pandemi berkepanjangan disarankan dilakukan dengan kebijakan kemudahan berusaha bagi masyarakat kecil dan kemudahan investasi bagi sektor swasta yang potensial menggerakkan ekonomi dengan kebiasaan baru yang disiplin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah R. 2020. The last mile problem penurunan kemiskinan [Internet]. [diunduh 2020 Sep 30]. Tersedia dari: <https://www.watyutink.com/opini/The-Last-Mile-Problem->
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2017. Analisis wilayah dengan kemiskinan tinggi [Internet]. Bangka Belitung (ID): Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. [diunduh 2020 Sep 24]. Tersedia dari: http://bappeda.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/perencanaan/Renstra%202017_2022_.pdf
- Suryahadi A, Suryadarma D, Sumarto S. 2006. Economic growth and poverty reduction in Indonesia: the effects of location and sectoral components of growth. SMERU Working Paper, August 2006. Jakarta (ID): SMERU Research Institute
- Tarigan H, Simatupang P, Wahyuni S, Maulana M. 2019. Strategi penanggulangan kemiskinan di pertanian dan perdesaan. Laporan

Akhir Penelitian. Bogor (ID): Pusat
Penelitian Sosial Ekonomi dan
Kebijakan Pertanian

<https://babel.bps.go.id/pressrelease.html>

Yusuf AA. 2020. Poverty and
distributional impact of Covid-19
Crisis in Indonesia. Presented at
WIDER Webinar Series: How is
Covid-19 changing development?
2020 May 12. Bandung (ID): SDGs
Center, Universitas Padjadjaran.

http://bappeda.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/perencanaan/Renstra%202017_2022_.pdf

<https://bangka.tribunnews.com/2020/10/16/tanggulangi-dampak-covid-19-pemprov-bangka-belitung-bantu-5000-kemasan-pada-pelaku-ikm>